

Rabu, 13 Agustus 2008

Sumber: Bisnis Indonesia, <http://www.bisnis.com>

Pungutan liar di usaha manufaktur meningkat 15%-20%

JAKARTA: Sepanjang Januari-Juni 2008, pungutan liar (*grease money*) di industri manufaktur meningkat 15%-20% menjadi sekitar US\$180 juta kendati pemerintah gencar memberantas korupsi. Inspeksi mendadak di sejumlah instansi pemerintah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai belum memberikan efek jera bagi pelakunya.

Merebaknya pungli di sektor ini diungkapkan Pengamat Industri dan Ekonomi Universitas Gadjah Mada Mudrajad Kuncoro. Berdasarkan hasil studi terhadap data yang dirilis Bank Dunia dan lembaga For Governance Reform, perputaran uang haram di sektor industri nasional sepanjang semester I/2008 meningkat hingga 20%. "Data ini valid," katanya kepada Bisnis, kemarin.

Hasil studi tersebut mengungkapkan indikasi adanya praktik pungli di empat pintu utama. Pertama, sektor birokrasi yang menangani perizinan dagang, investasi baru dan perluasan usaha. Kedua, aktivitas yang berhubungan dengan tender proyek swasta dan pemerintah. Ketiga, lanjutnya, kebijakan yang berhubungan dengan mutasi pejabat dan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Keempat, pelayanan yang berkaitan dengan arus barang dan jasa.

"Keempat pintu utama ini layak dicermati. Kalau perlu KPK dan BPKP [Badan Pengawas Keuangan dan Perdagangan] terus melakukan sidak. Pasti akan ada banyak sejumlah birokrat dari berbagai instansi teknis dan pengusaha yang tertangkap karena terlibat permainan uang pelicin," katanya.

Nilai uang pelicin di industri manufaktur, lanjutnya, hingga akhir tahun diperkirakan melonjak dari rerata US\$300 juta per tahun menjadi US\$400 juta per tahun. Uang tersebut digunakan untuk membayar upeti dan biaya ekstra lainnya. Lokasi rawan pungli yang berkaitan dengan arus barang dan jasa terutama terjadi di jalan raya dan pelabuhan.

Semua kegiatan yang memicu *high cost economy*, kata Kuncoro, telah menimbulkan inefisiensi sehingga industri di dalam negeri sulit berkembang dan berdaya saing rendah. "Pergantian rezim hanya pertanda ganti pemain. Birokrat kita masih banyak yang berjiwa *predator* dari pada menjadi pelayan masyarakat," tegasnya.

Di luar Jawa

Berdasarkan survei tersebut, lanjutnya, sebagian besar aktivitas pungli di luar Jawa terjadi Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Hal ini karena mekanisme kontrol menjadi sangat terbatas mengingat luasnya wilayah perairan dan daratan. "Komitmen sejumlah Pemprov mereformasi birokrasi memang terlihat manis seperti mekanisme *one stop service* dan pelayanan satu atap satu pintu. Namun, pada kenyataannya, dalam pelayanannya masih banyak meja yang harus dilalui," ujar Kuncoro.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi menambahkan kegiatan impor ilegal juga berperan besar dalam memicu merebaknya pungli di sektor industri karena pelaku tidak menyetorkan sejumlah pajak kepada pemerintah.

Berdasarkan catatan Bisnis, peredaran produk baja ilegal dan nonstandar diperkirakan mencapai di atas US\$1 miliar (lebih dari Rp9 triliun) dalam tiga tahun terakhir hingga 2007, atau sekitar 33% dari nilai impor baja yang resmi tercatat di Departemen Perdagangan sebesar US\$3,37 miliar per tahun.

"Kegiatan ini mendistorsi pasar karena perusahaan di dalam negeri tidak bisa berkompetisi dengan sehat terhadap produk impor ilegal yang tidak membayar bea masuk (BM). Pada saat yang sama, industri kita semakin tertekan sehingga banyak yang rontok," katanya. (*yusuf.waluyo@bisnis.co.id*)

Oleh: **Yusuf Waluyo Jati**

Bisnis Indonesia